

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 45 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian, kemampuan berkomunikasi, dan kepercayaan diri agar dapat memberikan pelayanan farmasi klinik dengan baik, termasuk penyampaian informasi dan edukasi dengan benar dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Mahasiswa PSPA perlu mempelajari sistem manajemen di apotek agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola apotek.
3. Mahasiswa PSPA perlu memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan farmasi agar dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Apotek sebaiknya menyediakan ruang khusus konseling agar pasien dapat merasa lebih nyaman dan terbuka selama proses konseling karena privasinya lebih terjaga.
5. Pendokumentasian *Patient Medication Record* (PMR) secara lengkap hendaknya dilakukan terhadap semua pasien agar riwayat pengobatan pasien dapat diketahui dan ditelusur, serta dapat mengetahui perkembangan kondisi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Blenkinsopp, A., Paxton, P., Blenkinsopp, J., 2014. *Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illness*, 7th ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
- British Medical Association, 2016, *British National Formulary for Children*, Royal Pharmaceutical Society, London.
- British Medical Association, 2017, *British National Formulary 73th ed.*, Royal Pharmaceutical Society, London.
- DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G., Posey, L.M. (Eds), 2017. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*, 10th ed. McGraw-Hill Education, New York.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2006. *Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2008. *Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hartini, Y.S., & Sulasmono, 2007, Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 118/Menkes/SK/IV/2014 tentang Kompendium Alat Kesehatan.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., Lance, L.L., 2009. *Drug Information Handbook: A Comprehensive Resource for All Clinicians and Healthcare Professionals*, 17th ed. Lexi-Comp, Inc., Ohio.
- Mashuda, A. (Ed), 2011. *Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPF)*. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- McEvoy, G.K. (Ed), 2011. *AHFS Drug Information Essentials*. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda.
- Medscape. 2018, Medscape: Drug & Diseases (Version 4.1.4) [Mobile application software]. Retrieved from <http://play.google.com>.
- MIMS, 2018. MIMS Indonesia (Version 1.6.0.7) [Mobile application software]. Retrieved from <http://play.google.com>.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Perhimpunan Reumatologi Indonesia, 2014, Diagnosis dan Pengelolaan ARTRITIS REUMATOID, Indonesia : Perhimpunan Reumatologi Indonesia.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2012. *Manajemen Farmasi*, edisi 4. Airlangga University Press, Surabaya.
- Shah, A. dan Clair, E.W.S. 2013, 'Rheumatoid Arthritis' dalam Fauci, A.S dan Langford, C.A., Harrison's Rheumatology, 3rd ed, McGrawHill, New York, pp 87-105.
- Singh, J., Saag, K., Bridges, L., Aki, E., Bannuru, R., 2015, 2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis, American College of Rheumatology, (2): 1- 25.
- Skidmore-Roth, L., 2017. *Mosby's Drug Guide for Nursing Students*, 12th ed. Elsevier, Inc., St. Louis.

- Stockley's Drug Interaction, 2008, 8th ed., K. Baxter (Ed.), Pharmaceutical Press, London
- Suarjana, I.N., 2012, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Interna Publishing, Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/83 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Sweetman, S.C. 2009. Martindale The Complete Drug Reference 36TH Edition. Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S. et al. 2003. A to Z Drug Facts. Facts and Comparisons.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Whalen, K., 2015, Drugs for Diabetes, in Whalen, K., Finkel, R., Panavelil, T. A., Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6th edition, Philadelphia, pp 335-343.